Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 3, Issue 10, May 2026, P 296-306
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20251826

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya

Evaluation of the Family Hope Program (PKH) in Krembangan Utara, Pabean Cantian District, Surabaya

Indah Ramadhani[1)], Tjitjik Rahaju[2)], Indah Prabawati[3)], Ahmad Niar Hilmi[4)]
[1,2,3,4]Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Ilmu Administrasi Negara

INFO ARTIKEL
Riwayat artikel:
Received 30 April 2026
Revised 5 May 2026
Accepted 10 May 2026
Available online 15 May 2026

Keywords: *Program Evaluation, Family Hope Program (PKH), Poor Families*
Keywords: *Evaluasi Program, Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Miskin*

Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author.
Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to describe the evaluation of PKH in Krembangan Utara Village, Surabaya City. This research used a qualitative approach with a descriptive research type. Research subjects were determined using purposive sampling and snowball sampling techniques. The research focus employed William N. Dunn's public policy evaluation theory, consisting of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used were data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that PKH in Krembangan Utara Village still faces several obstacles in its implementation. In terms of effectiveness, the objectives of PKH have generally been achieved, although the benefits have not been fully felt by all beneficiary families. In terms of efficiency, facilitators still face task limitations and insufficient operational funds. The adequacy indicator has not shown optimal results because assistance remains limited in meeting all the basic needs of beneficiary families. Equity has also not been implemented properly, as there are still beneficiaries who do not match the criteria stipulated in the regulations. Responsiveness is considered very good due to the existence of complaint mechanisms and direct assistance. In terms of accuracy, PKH has not fully addressed the problems faced by poor families because the program benefits have not been fully experienced by all beneficiary families.

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan evaluasi PKH di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Fokus penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pegumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH di Kelurahan Krembangan Utara masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.Pada indikator efektivitas, tujuan PKH secara umum telah tercapai, namun manfaat program belum dirasakan seluruh KPM. Indikator efisiensi, Pendamping masih menghadapi keterbatasan tugas dan dana operasional belum mencukupi. Indikator kecukupan belum memperlihatkan hasil yang optimal karena masih ditemukan keterbatasan bantuan dalam memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat. Perataan juga belum berjalan baik karena masih ditemukan ketidaksesuana penerima dengan kriteria yang ditetapkan di peraturan. Responsivitas PKH dinilai sangat baik karena didukung mekanisme pengaduan dan pendampingan langsung. Indikator ketepatan, PKH belum mampu menjawab permasalahan yang dihadapi keluarga miskin, karena manfaat program belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh KPM.

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan yang serius dalam suatu bangsa karena menimbulkan berbagai dampak negatif termasuk menghambat pertumbuhan perekonomian negara (Pasha, 2023). Sebagai negara berkembang, Indonesia juga masih menghadapi tantangan kemiskinan

Email: indah.22105@mhs.unesa.ac.id, tjitjikrahaju@unesa.ac.id, indahprabawati@unesa.ac.id, ahmadnizarhilmi@unesa.ac.id

yang tak kunjung usai. Masalah ini memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah karena dapat berefek pada pencapaian tujuan serta cita-cita negara seperti yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 yakni mewujudkan masyarakat sejahtera (Sa'adah *et al.,* 2024).

Berbagai program telah telah dijalankan dalam bentuk bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan (Shintia *et al.,* 2022). Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. PKH dijalankan dari tahun 2007 dengan mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan PKH (2007) yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Kebijakan ini menjadi salah satu bagian dari jaring pengamanan sosial di Indonesia (Nugroho & Azmi, 2021).

Pembentukan PKH sangatlah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan tujuan mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang dan mengurangi kesenjangan yang terjadi akibat kemiskinan di Indonesia (Nova *et al.,* 2024). Sasaran dari program PKH ini mencakup keluarga miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin (Kemensos, 2018). Secara nasional, PKH dinilai telah menunjukkan kinerja sebagai salah satu program sosial paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (Rohmi *et al.,* 2023).

Surabaya merupakan salah satu daerah yang telah menjalankan PKH sejak tahun 2013 dengan jumlah penerima manfaat di tahun 2023 sebesar 70.229 KPM. Artinya, selama lebih dari satu dekade, Surabaya telah menjadi bagian penting dari upaya nasional untuk memutus rantai kemiskinan melalui intervensi bantuan sosial bersyarat. Namun, di balik capaian angka dan lamanya pelaksanaan program tersebut, masih tersimpan berbagai persoalan mendasar yang menuntut perhatian serius. Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa PKH di Kota Surabaya masih memerlukan evaluasi karena terdapat tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Fauzan & Isbandono (2024) menyatakan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Jambangan belum optimal karena masih ditemukan ketidaktepatan sasaran dan penyalahgunaan bantuan. Selain itu, Asyavira (2024) mengungkapkan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Krembangan menghadapi kendala berupa data yang belum valid, proses verifikasi yang kurang optimal, serta rendahnya objektivitas pendataan. Hasil wawancara dengan Sub Koordinator Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya juga menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat, penyalahgunaan dana bantuan, serta munculnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan PKH, sehingga pelaksanaan program belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya. Berdasarkan hasil observasi awal bantuan PKH di Kelurahan ini tidak hanya dimanfaatkan sesuai peruntukannya, seperti biaya pendidikan dan kesehatan, tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi KPM yang sebagian besar bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran fungsi PKH dari bantuan sosial bersyarat menjadi penopang kebutuhan hidup harian, yang berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan sosial apabila tidak diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan PKH di Kelurahan Krembangan Utara juga masih menghadapi kendala terkait ketepatan sasaran penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu KPM, ditemukan bahwa masih terdapat warga yang dinilai layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar, sementara beberapa penerima dinilai sudah mampu secara ekonomi namun masih memperoleh bantuan (Wawancara, 25 September 2025). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Garini *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan PKH masih menghadapi permasalahan pemerataan penerima manfaat. Hal serupa juga disampaikan oleh Ike Sulistyo Wijayanti yang menyebutkan bahwa keluhan masyarakat mengenai penerima bantuan yang dianggap tidak layak masih sering terjadi (Wawancara, 24 September 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn. Evaluasi ini penting dilakukan karena implementasi dan tantangan PKH di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan administrasi wilayah masing-masing (Anggraeni & Nugroho, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Permatasari, 2020). Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud dan ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Ibrahim, 2024). Kedua definisi ini menegaskan bahwa kebijakan bukan sekadar keputusan spontan, melainkan tindakan yang disengaja dan dirancang secara sistematis untuk memberikan solusi terhadap isu publik yang dihadapi.

Suatu kebijakan disusun melalui serangkaian proses mulai dari perumusan masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif (Dye dalam Prabawati, 2020). Oleh karena itu, evaluasi menjadi tahapan penting yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan. Evaluasi berfungsi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan, diadopsi, dan diimplementasikan mampu memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan awal, yakni memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat (Akbar & Mohi, 2018).

Model evaluasi William N. Dunn merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam analisis kebijakan publik karena memberikan panduan yang komprehensif untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan dari berbagai aspek. Dunn memandang bahwa evaluasi kebijakan harus mampu memberikan dasar rasional bagi pengambilan keputusan, baik dalam memperbaiki, mempertahankan, maupun mengganti kebijakan yang telah dilaksanakan. Terdapat enam indikator kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003) yakni:

1. Efektivitas
   Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari di adakannya tindakan.
2. Efisiensi
   Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang digunakan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan
   Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuha, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah
4. Perataan
   Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh pihak sasaran kebijakan publik

5. Responsivitas
   Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan
   Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya. Fokus penelitian menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan penelitian. Observasi dilakukan dengan mengikuti kegiatan verifikasi calon KPM, proses pendampingan, serta pertemuan antara pendamping sosial dan KPM. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pemahaman, pengalaman, serta pandangan subjek penelitian terkait pelaksanaan PKH, pemanfaatan bantuan, dan pemenuhan kewajiban sebagai penerima manfaat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, laporan pelaksanaan PKH, data statistik, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri atas Sub Koordinator Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya, Koordinator PKH Kota Surabaya, Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan Krembangan Utara, pendamping PKH, serta beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Krembangan Utara. Selain purposive sampling, penelitian ini juga menggunakan teknik snowball sampling untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Haq, 2023). Data yang diperoleh kemudian diseleksi, disederhanakan, dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian berdasarkan indikator evaluasi William N. Dunn. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan dokumentasi pendukung untuk mempermudah proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah mengenai evaluasi pelaksanaan PKH di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam klasifikasi program perlindungan sosial, PKH termasuk dalam model Social Transfer berupa bantuan tunai yang dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. Tujuan PKH sebagaimana termuat dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 yakni:

a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH melalui akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dalam mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial;
d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan

e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Bantuan ini diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) (Kemensos, 2021). Penerima PKH dikategorikan berdasarkan tiga komponen, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

PKH di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya telah berjalan sejak tahun 2013. Terdapat 494 KPM di kelurahan Krembangan Utara yang didampingi 2 orang pendamping untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PKH. Implementasi PKH di Kelurahan Krembangan Utara dilaksanakan oleh Pendamping PKH yang berada di bawah koordinasi Dinas Sosial Kota Surabaya dan koordinator PKH Kota Surabaya.

Pelaksanaan PKH di Kelurahan Krembangan Utara, sejak awal implementasinya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang berpotensi memengaruhi capaian program. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana PKH berjalan secara optimal, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang meliputi enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan sasaran, dan responsivitas.

Efektifitas

Efektivitas kebijakan menunjukkan sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2003). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, PKH bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan melalui peningkatan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Data Dinas Sosial Kota Surabaya juga menunjukkan jumlah keluarga miskin di Kelurahan Krembangan Utara mengalami penurunan dari 1.385 keluarga pada tahun 2022 menjadi 353 keluarga pada tahun 2025. Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Keluarga Miskin di Kelurahan Krembangan Utara Tahun 2022-2025

Tahun	Jumlah Keluarga Miskin
2022	1.385
2023	1.136
2024	556
2025	353

Sumber: Diolah Peneliti dari Dinas Sosial Kota Surabaya

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PKH di Kelurahan Krembangan Utara telah berperan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wulandari (2021) yang menyatakan bahwa PKH merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan PKH dinilai mampu membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga KPM, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh salah satu KPM berikut:

"PKH sangat membantu untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari karena penghasilan suami tidak tetap" (Wawancara, 17 Desember 2025).

Selain membantu pemenuhan kebutuhan dasar, PKH juga mendorong KPM untuk lebih rutin memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan sesuai ketentuan program. Dengan demikian, efektivitas PKH di Kelurahan Krembangan Utara dapat dikatakan cukup baik karena program mampu membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin serta meningkatkan akses layanan dasar sesuai tujuan program (Subarsono, 2023).

Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan seberapa besar sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan (Dunn, 2003). Dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Krembangan Utara, efisiensi program terlihat melalui koordinasi yang melibatkan Dinas Sosial Kota Surabaya, Koordinator PKH, dan pendamping sosial di tingkat kelurahan. Pembagian tugas yang jelas memungkinkan pelaksanaan program berjalan lebih terarah dan meminimalkan tumpang tindih pekerjaan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Nugroho (2019) bahwa implementasi kebijakan membutuhkan koordinasi antaraktor agar kebijakan berjalan efektif, serta pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2022) yang menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam keberhasilan program.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan tenaga dan anggaran belum sepenuhnya optimal. Rasio satu pendamping yang menangani sekitar 300–400 KPM menyebabkan tingginya beban kerja, terutama dalam proses verifikasi, pemutakhiran data, serta pelaksanaan kegiatan P2K2. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional pendamping sebesar lima ratus ribu rupiah per tahun membuat intensitas pendampingan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas KPM belum berjalan maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutmasa (2021) bahwa efisiensi dipengaruhi oleh keseimbangan antara beban kerja dan kapasitas pelaksana.

Meskipun terdapat keterbatasan tenaga dan anggaran, efisiensi biaya bagi KPM dinilai cukup baik karena tidak ditemukan pungutan tambahan dalam proses pencairan bantuan. Bantuan PKH disalurkan langsung melalui bank penyalur atau kantor pos sehingga dana diterima KPM secara utuh tanpa potongan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Krembangan Utara telah mampu menekan biaya transaksi bagi penerima manfaat sehingga bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan program (Winarno, 2014).

Kecukupan

Kecukupan dalam evaluasi kebijakan publik berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan kelompok sasaran dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi (Dunn, 2003). Dalam konteks PKH, kecukupan tidak diukur dari kemampuan program dalam menghilangkan kemiskinan secara menyeluruh, melainkan dari sejauh mana bantuan mampu membantu KPM memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa bantuan sosial bertujuan melindungi masyarakat dari risiko sosial serta meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, PKH diposisikan sebagai bantuan sosial yang bersifat stimulan dan pelindung sosial, bukan sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga. PKH di Kelurahan Krembangan Utara cukup efektif dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan meringankan beban pengeluaran KPM, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi kerentanan ekonomi secara menyeluruh, khususnya bagi KPM dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Sebagian besar KPM menyatakan bahwa bantuan PKH cukup membantu memenuhi kebutuhan sekolah anak dan layanan kesehatan sehingga akses terhadap layanan dasar tetap terjaga. Namun, kecukupan bantuan bersifat relatif dan dipengaruhi kondisi sosial ekonomi masing-masing KPM. Pada keluarga dengan penghasilan tidak tetap maupun lansia yang hidup sendiri tanpa dukungan keluarga, bantuan PKH belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup sehingga lebih berfungsi sebagai bantuan tambahan daripada solusi jangka panjang terhadap kemiskinan.

Perataan

Perataan (equity) dalam evaluasi kebijakan publik berkaitan dengan keadilan distribusi manfaat kebijakan kepada kelompok sasaran sesuai tingkat kebutuhan dan kerentanannya (Dunn, 2003). Dalam konteks PKH, indikator perataan menunjukkan sejauh mana bantuan disalurkan kepada keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria penerima manfaat.

Penetapan kelayakan penerima PKH secara normatif mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), di mana calon penerima berasal dari keluarga pada desil 1 hingga desil 4, yaitu kelompok sangat miskin sampai rentan miskin. Mekanisme ini menunjukkan bahwa perataan bantuan PKH tidak dimaknai sebagai pembagian yang sama rata, melainkan distribusi yang proporsional berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Subarsono (2023) bahwa kebijakan publik harus mampu mempromosikan keadilan sosial dalam masyarakat. Berikut sebaran KPM PKH di Kelurahan Krembangan Utara:

Tabel 3. Sebaran KPM PKH Kelurahan Krembangan Utara Tahun 2025

RW	JUMLAH PENERIMA PKH
1	79 KK
2	51 KK
3	13 KK
4	23 KK
5	62 KK
6	31 KK
7	20 KK
8	41 KK
9	44 KK
10	42 KK
JUMLAH	406 KK

Sumber: Data diolah peneliti dari Laporan Tahunan Pendaping PKH Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian, secara administratif distribusi penerima PKH di Kelurahan Krembangan Utara telah tersebar di seluruh RW dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai kondisi sosial ekonomi masing-masing wilayah. Namun demikian, secara substantif perataan bantuan PKH belum sepenuhnya tercapai. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat keluarga miskin yang memenuhi komponen PKH tetapi belum menerima bantuan, sementara terdapat pula keluarga yang kondisi ekonominya relatif mampu namun masih terdaftar sebagai KPM.

Meskipun demikian, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial terus melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara berkala serta mengarahkan keluarga miskin yang belum menerima PKH untuk memperoleh bantuan sosial daerah lainnya. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memperluas perlindungan sosial dan menjaga keberlanjutan manfaat program bagi masyarakat miskin dan rentan.

Responsivitas

Responsivitas dalam evaluasi kebijakan publik berkaitan dengan kemampuan kebijakan dan pelaksananya dalam menanggapi kebutuhan, keluhan, dan permasalahan masyarakat sasaran secara tepat (Dunn, 2003). Dalam pelaksanaan PKH, responsivitas terlihat dari kemampuan pendamping sosial, koordinator, dan Dinas Sosial dalam merespons kendala yang dihadapi KPM. Hal ini sejalan dengan pendapat Winarno (2020) bahwa kebijakan publik yang responsif ditandai dengan adanya mekanisme penanganan aspirasi dan permasalahan masyarakat secara cepat dan proporsional.

Berdasarkan hasil penelitian, responsivitas PKH di Kelurahan Krembangan Utara diwujudkan melalui koordinasi berjenjang antara pendamping sosial, koordinator PKH, dan Dinas Sosial. Pendamping sosial menjadi pihak yang paling responsif karena berinteraksi langsung dengan KPM dan menangani berbagai kendala teknis maupun administratif. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bahri selaku Pendamping PKH:

"Jika ada pelaporan kendala yang dialami KPM mengenai program, akan langsung kami respons dan dampingu KMP secepat mungkin sampai permasalahan selesai." (Wawancara Pendamping PKH, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa responsivitas PKH tidak hanya berupa penyampaian informasi, tetapi juga pendampingan langsung dalam menyelesaikan masalah KPM. Selain itu, pendamping juga aktif memberikan penjelasan terkait jadwal pencairan bantuan, kewajiban program, dan perubahan ketentuan sehingga membantu KPM memperoleh kepastian informasi. Dinas Sosial turut menindaklanjuti laporan masyarakat terkait data penerima dan mengarahkan keluarga miskin yang belum menerima PKH ke program bantuan sosial daerah lainnya. Dengan demikian, responsivitas.

Ketepatan

Ketepatan dalam evaluasi kebijakan publik berkaitan dengan kesesuaian antara tujuan, sasaran, dan pelaksanaan kebijakan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dunn (2003) menjelaskan bahwa kebijakan dikatakan tepat apabila mampu menjawab kebutuhan kelompok sasaran, diberikan kepada penerima yang sesuai, serta dilaksanakan pada waktu yang dibutuhkan. Dalam konteks PKH, ketepatan tidak hanya dilihat dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut mampu membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, PKH di Kelurahan Krembangan Utara dinilai cukup tepat dalam merespons permasalahan utama keluarga miskin, terutama keterbatasan pendapatan dan tingginya beban pengeluaran pendidikan serta kesehatan. Bantuan PKH dimanfaatkan KPM untuk kebutuhan sekolah anak, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa program telah relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya keluarga dengan penghasilan tidak tetap, anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.

Ketepatan program juga terlihat dari kriteria penerima yang didasarkan pada komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sebagian besar KPM di Kelurahan Krembangan Utara telah sesuai dengan kriteria tersebut, terutama keluarga yang memiliki anak sekolah dan lansia. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah KPM PKH berdasarkan Komponen Penerima di Kelurahan Krembangan Utara Tahun 2025

KOMPONEN PKH	JUMLAH KPM
Anak SD	74
SMP	58
SMA	54
Anak Usia Dini	21
Ibu Hamil	0
Lansia	238
Disabilitas	49

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Pendamping PKH Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa ketepatan sasaran belum sepenuhnya

optimal. Masih terdapat KPM yang secara ekonomi sudah tergolong mampu atau tidak lagi memiliki komponen PKH tetapi tetap menerima bantuan. Sebaliknya, terdapat masyarakat miskin dan lansia yang hidup sendiri namun belum terdaftar sebagai penerima PKH. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran dan verifikasi data belum berjalan secara optimal sehingga menimbulkan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Selain ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran bantuan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan PKH tetap disalurkan sebanyak empat tahap dalam satu tahun sesuai ketentuan program. Akan tetapi, waktu pencairan antar tahap tidak selalu konsisten dan terkadang mengalami keterlambatan akibat proses verifikasi dan pemutakhiran data dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, sebagian besar KPM menilai bantuan tetap tepat waktu selama pencairan masih dilakukan secara lengkap dalam satu tahun anggaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Krembangan Utara telah mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Evaluasi program menggunakan teori William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH belum berjalan secara optimal.

Dari aspek efektivitas, PKH mampu membantu meringankan beban ekonomi KPM, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Namun, manfaat program belum dirasakan secara merata oleh seluruh KPM karena adanya perbedaan kondisi ekonomi dan tingkat kerentanan keluarga penerima. Pada aspek efisiensi, pelaksanaan PKH telah didukung pembagian tugas yang jelas antar pelaksana program. Akan tetapi, keterbatasan dana operasional dan tingginya beban kerja pendamping menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara efisien dan optimal.

Dari aspek kecukupan, bantuan PKH cukup membantu pemenuhan kebutuhan dasar KPM, terutama pendidikan dan kesehatan. Namun, bantuan tersebut belum mampu mengatasi kerentanan ekonomi secara menyeluruh, terutama bagi keluarga dengan penghasilan tidak tetap dan lansia yang hidup sendiri tanpa sumber pendapatan tambahan. Pada aspek perataan, penetapan penerima PKH telah mengacu pada DTSEN dan kriteria komponen program. Meski demikian, masih ditemukan ketidaktepatan sasaran akibat proses pendataan sebelumnya yang belum sepenuhnya berdasarkan kondisi riil masyarakat. Hal ini menyebabkan masih adanya keluarga yang tidak layak menerima bantuan tetapi terdaftar sebagai KPM, sementara sebagian keluarga rentan belum terakomodasi.

Dari aspek responsivitas, PKH dinilai berjalan sangat baik. Pendamping sosial berperan aktif dalam membantu KPM menghadapi berbagai kendala administratif maupun teknis, serta melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan Dinas Sosial sehingga permasalahan dapat ditangani dengan cepat. Sementara itu, aspek ketepatan menunjukkan bahwa PKH telah sesuai dengan kebutuhan dasar keluarga miskin, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran bantuan masih belum optimal karena masih ditemukan penerima yang tidak sesuai kriteria serta jadwal pencairan bantuan yang tidak selalu konsisten.

REFERENSI

Agustino, L. (2022). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfa Beta. Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan. (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). Gorontalo: *Ideas Publishing.*

Asyavira, A. A., Puspaningtyas, A., & Wahyudi, E. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 4(6) November (2024) e-ISSN: 2797-0469.

Dunn, William N.. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Fauzan, M. F., & Isbandono, P. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 1*(2), 390-401.

Garini, N. A., Ramadhan, S. H., Aliyyah, I. N., Syahrul Ramadhan, I. R., & Sukmawati, E. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan Dengan *Logic Model* Di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik., 43 - 63.

Haq, A. F. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship And Management Review*, 1(1), 1–10.

Ibrahim. (2024). Pengantar Kebijakan Publik: Teori, Analisis, Proses dan Studi Kasus*.* Yogyakarta: K-Media.

Kemensos. (2021). Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021-2024. Kementerian Sosial Republik Inonesia.

Nova, H. D., Priyadi, B. P., & Purnaweni, H. (2024). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1)

Nugroho, A. A., & Azmi, I. F. (2021). *Alleviating Societyas Economic Crisis: Narrative Policy on Social Safety Nets Policy Process During Covid-19 Pandemic. Policy and Governance Review*, 5(2).

Pasha, D. A. (2024). Efek Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Indonesia. Karimah Tauhid, 3(1), 690-693. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.9266

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/lembaga

Permatasari, I. A. (2020). Book Review Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government,*, 1(1), 33-37.

Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Prabawati, I., Rahayu, T., & Kurniawan, B. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Surabaya: Unesa *University Press.*

Rohmi, M. L., Pratiwi, D., & Ramadhani, A. A. (2023). Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kaitannya dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 22(2).

Sa'adah, A. T., Puspaningtyas, A., & Wahyudi, E. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 4(5).

Shintia, Suwitri, S., & Wismaningtyas, T. A. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Baledono Kabupaten Purworejo. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), 6(2).

Subarsono, A. G. (2023). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi (Edisi Revisi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4(1), 25–36.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Winarno, B. (2020). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Wulandari, N. (2021). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Panakkukang Kota Makasar. Universitas Hasanudin.